KESEJAHTERAAN RAKYAT

Gereja Katolik pada Saat-saat Kritis Sejarah Bangsa

F. HASTO ROSARIYANTO, SJ

Pengantar

Surat Gembala Prapaska 1997 dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang bertajuk: "Keprihatinan dan Harapan" dipandang sebagai sebuah Surat Gembala yang profetis. Tanggal 14 Juni 1997 adalah Hari Pemilihan Umum, sementara Surat Gembala Prapaska dikeluarkan pada bulan Maret 1997. Menilik situasi sosial-politik pada waktu itu, dan dengan gejolak sosial yang mengarah pada tindak kekerasan yang dialamatkan kepada komunitas Kristen, sebutan profetis untuk Surat Gembala Prapaska 1997 tidaklah berlebihan. Seruan "Keprihatinan dan Harapan" itu bergema tidak hanya di kalangan komunitas Katolik. Bahkan, *The Herald Tribune*, surat kabar harian yang berskala internasional, memberi komentar dengan menulis bahwa "untuk pertama kalinya Gereja Katolik Indonesia mengambil posisi yang jelas" terhadap situasi negaranya. Reaksi di dalam Gereja Katolik sendiri beragam. Ada yang mendukung, ada yang menentang dengan alasan bahwa Surat Gembala Prapaska itu bisa jadi hanya membahayakan diri secara tidak perlu.

Adanya perbedaan pendapat sebenarnya sesuatu yang wajar, juga di antara umat Katolik. Hanya saja, tradisi politik di Indonesia yang begitu lama menabukan perbedaan telah turut mewarnai suasana umum di dalam diri rakyat. Era Reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menciptakan suasana yang sama sekali baru. Perbedaan pandangan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Orang pun semakin bebas memaparkan gagasannya. Perubahan-perubahan dalam pelbagai bidang pun tidak bisa dihindarkan. Diskusi dan perdebatan di sekitar Masa Depan Indonesia atau Indonesia Baru digelar di mana-mana.

Gereja Katolik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia juga dituntut mengambil sikap. Gerakan-gerakan di dalam Gereja Katolik yang menyikapi situasi sosial-politik baru muncul di sana-sini. Munculnya Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) harus diletakkan dalam suasana ini, yakni suatu bentuk kerinduan akan adanya wadah yang dapat menampung pelbagai gerakan yang muncul di dalam Gereja Katolik. Terlepas dari masih adanya pro-kontra terhadap lahirnya FMKI, tidak bisa disangkal bahwa FMKI itulah satu-satunya forum di kalangan umat Katolik yang berhasil mengumpulkan berbagai aliran dan pandangan di dalam Gereja Katolik di Indonesia untuk duduk dan berbincang bersama menanggapi situasi baru di Indonesia.

Tulisan ini tidak bermaksud memberi penilaian terhadap gerakan-gerakan yang terjadi di dalam Gereja Katolik berkaitan dengan situasi sosial-politik Indonesia yang baru; juga tidak mau memberi usulan atau pandangan tentang bagaimana Gereja Katolik harus bersikap. Tulisan ini hanya mau memberi paparan selintas tentang bagaimana Gereja Katolik di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengambil sikap atau mengantisipasi perubahan-perubahan sosial-politik yang terjadi. Dalam skala yang boleh dikata amat kecil, keterlibatan Gereja Katolik sebenarnya sudah dimulai bersama dengan Pergerakan Nasional. Sewaktu Indonesia mencari bentuk yang cocok bagi negaranya, umat Katolik juga terlibat di sana (KUKSI 1949 dan 1954). Sewaktu pemerintah Orde Lama diganti dengan Orde Baru, Gereja juga mencoba untuk menemukan perannya yang sesuai dengan tuntutan waktu (MUKSI 1972). Dari pemaparan itu, kita bisa bercermin bagaimana Gereja Katolik memperlihatkan suatu sikap yang konsisten terhadap tanda-tanda zaman dan bagaimana Gereja Katolik–entah karena dorongan Roh Kudus, entah karena dipaksa oleh situasi–harus berani menyuarakan komitmennya terhadap kebenaran yang diyakininya, juga kalau sikap itu berarti harus berseberangan dengan posisi pemerintah atau penguasa.

Visi Misioner Romo Van Lith: Pembebasan Menyeluruh

Keterlibatan Gereja di dalam pembangunan masyarakat dapat diwujudkan lewat beragam bentuk. Gereja Katolik di Indonesia patut bersyukur karena sejak awal perkembangannya sudah ditanamkan kesadaran akan dirinya sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Penanaman kesadaran itu terutama berpangkal pada praksis misi seorang misionaris Belanda, Romo Frans van Lith, SJ. Pandangan-

pandangannya dalam bidang kegerejaan, sosial-ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik bermuara pada satu kata: *pembebasan.*[1]

"Karya misi tidak bisa dikatakan berhasil kalau tidak mampu mengangkat taraf hidup ekonomi rakyat pedesaan", begitulah rumusan bebas dari awal kiprahnya di antara masyarakat Jawa. Sebagian besar orang yang dihadapi hidup dari dunia pertanian, maka keterlibatan Gereja juga harus mulai dari keprihatinan rakyat dalam bidang pertanian. Sebagian petani ternyata terjerat hutang dalam pertengkulakan, maka Gereja harus mencari pemecahan konkret, praktis, dan sederhana atas realitas yang dihadapi petani itu. Keterlibatan Gereja harus berpangkal pada keprihatinan masyarakat yang dilayani. Proses pembebasan dengan pola pemberdayaan masyarakat setempat akan terus dikembangkan oleh van Lith sesuai dengan tuntutan situasi dan masa. Oleh karena itu, visi pendidikan dan visi politiknya akan lebih mudah dipahami dengan mengenali latar belakang pola pemikiran ini. Yang menjadi tujuan adalah pembebasan, pemerdekaan, kemandirian. Strategi untuk mencapainya adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin tenaga lokal, yang dalam kerangka pemikiran van Lith berarti orang Indonesia, dan konkretnya orang Jawa.

Tanpa bermaksud memutlakkan strategi van Lith dalam menanamkan kesadaran bermasyarakat dalam hidup menggereja, tidak bisa disangkal bahwa pola keterlibatan macam inilah yang telah memacu diterimanya Gereja Katolik sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Tambahan lagi keterlibatan politis Gereja Katolik dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran para anak asuh van Lith. Mereka itulah penerus cita-cita pembebasan dalam situasi yang sama sekali baru.

Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) 1949

KUKSI pertama diadakan di Yogyakarta dari tanggal 7 sampai dengan 12 Desember 1949, pada akhir revolusi fisik menjelang terbentuknya Negara Federasi Indonesia. Penggagas atau pemrakarsa Kongres ini adalah Bapak I.J. Kasimo. Pelaksanaan Kongres ini pantas dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Inilah kali pertama umat Katolik dari seluruh Indonesia datang berkumpul sebagai saudara seiman dan setanah air. Lebih dari itu, Kongres berskala nasional ini juga merupakan kongres nasional yang pertama kali dari suatu golongan masyarakat setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan.[2]

Kehadiran Presiden Soekarno dan wakilnya, Mohammad Hatta, dan para pejabat pusat maupun setempat merupakan dukungan yang amat berarti bagi umat Katolik di Indonesia yang jumlahnya amat kecil itu. Tujuan KUKSI 1949 adalah untuk menciptakan persatuan di antara umat Katolik, dan secara konkret penyelarasan semua organisasi Katolik di seluruh Indonesia di bawah satu bendera dan satu nama. Penyelarasan organisasi-organisasi Katolik yang ada di Indonesia dinilai amat penting secara politis. Kemerdekaan Indonesia sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Indonesia sebagai satu kesatuan negara masih terus-menerus dipersoalkan dan karena itu masih harus terus-menerus diperjuangkan. Organisasi-organisasi Katolik juga sudah muncul di berbagai tempat, tetapi mereka tidak dan/atau belum memiliki kesatuan organisasi atau hubungan organisatoris. Oleh karena itu, penyatuan organisasi itu juga memiliki makna politis.

Keterlibatan umat Katolik dalam percaturan politik Indonesia sudah diawali lama sebelum kemerdekaan dengan dideklarasikannya Perkumpulan Katolik untuk Aksi Politik Bagian Orang-orang Jawa (*Katholieke Vereeniging voor Politieke Actie Afdeling Katholieke Javanen*) pada bulan Agustus 1923. Inilah partai politik orang Katolik Jawa. Oleh karena itu, di antara orang Jawa, gerakan ini lebih dikenal dengan nama Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Kesadaran untuk berperan aktif di dalam menentukan masa depan bangsa ini dipelopori oleh sekelompok pemuda bekas murid Muntilan. Pada waktu itu, sudah ada *Indische Katholieke Partij* yang hampir seluruh anggotanya adalah orang Belanda. Sementara itu, ada gerakan politik yang ideologinya netral, antara lain Budi Utomo dan kelompok kepemudaan yang berlatar belakang kesukuan, seperti Jong Java, Jong Sumatra. Orang-orang Katolik yang ingin terlibat dalam kehidupan politik biasanya memilih gerakan-gerakan netral ini. Karena iman Katolik mereka, dalam perjalanan waktu, rasa nasionalis dan patriotik mereka diragukan: Mungkinkan beriman Katolik sekaligus nasionalis Indonesia? Oleh karena itu, meski jumlah orang Katolik masih sedikit, kerinduan akan adanya sebuah partai yang berasaskan nilai-nilai Katolik dipandang sebagai satu-satunya solusi terbaik. Itulah latar belakang berdirinya PPKD yang segera diikuti kelahirannya di daerah-daerah lain meski tanpa ikatan organisatoris. Justru karena itulah peleburan dari semua Partai Katolik yang masih berwarna kedaerahan di bawah satu bendera Partai Katolik merupakan suatu langkah penting bagi umat Katolik di Indonesia. Persetujuan ini dicapai pada tanggal 12 Desember 1949, hari terakhir pelaksanaan KUKSI I.

Penyatuan organisasi-organisasi Katolik lainnya segera menyusul, misalnya AMKRI (Pemuda Katolik), PMKRI (Mahasiswa Katolik), PGK (Guru Katolik), WKRI, dan lain-lain. Penyatuan ini penting bagi kehidupan bernegara karena I.J. Kasimo, salah seorang pemrakarsa KUKSI dan pimpinan Partai Katolik, melihat titik-titik terang akan terbentuknya kesatuan politik negara Indonesia atas dasar perkembangan pembicaraan-pembicaraan yang tengah berlangsung. Perlu juga diingat bahwa hierarki Gereja Indonesia baru akan berdiri pada tahun 1961 sehingga penggalangan kegiatan sosial-politik dari kaum awam merupakan sesuatu yang amat penting bagi Gereja Katolik.

KUKSI II, 1954

Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada bulan Desember 1949 di Yogyakarta, antara lain bertujuan untuk menciptakan persatuan di antara umat Katolik. Di dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia, itulah pertemuan yang pertama dalam skala nasional. Bagi umat Katolik, KUKSI 1949 merupakan saat penyadaran bahwa di samping sebagai anggota Gereja Katolik mereka adalah juga bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat Indonesia.

Lima tahun setelah KUKSI I, diadakanlah KUKSI II di Semarang yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 30 Desember 1954. Fokus perhatian KUKSI 1949 terletak pada menciptakan persatuan di antara umat Katolik, *gerak ke dalam*. Fokus perhatian KUKSI 1954 mengarah pada bentuk-bentuk partisipasi Gereja Katolik terhadap keprihatinan negara Indonesia, *gerak ke luar*. Yang tidak boleh dilupakan adalah kenyataan bahwa negara Republik Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Itulah Pemilihan Umum pertama yang akan terjadi di bumi Indonesia. Gereja Katolik sebagai bagian integral bangsa Indonesia bukan hanya perlu terlibat aktif tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan Pemilihan Umum itu kepada warganya. Oleh karena itu, Rapat Pleno pertama dari KUKSI 1954 diisi dengan topik "Undang-undang Pemilihan Umum".

Keterlibatan Gereja di dalam gerak pembangunan negara bukan hanya menjadi program KUKSI II. Dari sambutan-sambutan wakil pemerintah, kelihatan bahwa Gereja Katolik telah mendapat pengakuan dan penghargaan akan partisipasinya dalam kehidupan bernegara, baik di dalam pendidikan, kesehatan, maupun karya sosial. Hal ini secara eksplisit disinggung oleh Walikota Semarang: "Di kota besar Semarang,

kecuali adanya gereja-gereja Katolik, ada banyak pula sekolah-sekolah, rumah yatim dan rumah sakit yang semuanya itu dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan kewajibannya terhadap pembangunan negara." Sambutan Walikota juga menunjuk bahwa karya Gereja tersebut memperlihatkan keselarasan dasar-dasar agama Katolik dengan cita-cita nusa dan bangsa.[3] Sambutan dari Kolonel Moch. Bachroen, Panglima Divisi Diponegoro, menggarisbawahi usaha-usaha yang dibuat oleh Gereja Katolik sebagai sesuatu yang bukan hanya mengagumkan tetapi juga sangat berarti bagi negara: "Dengan segala usahausahanya yang konstruktif itu, terang bahwa masyarakat Katolik merupakan satu tiang yang dapat memperkokoh negara kita ini."[4]

Kalau sambutan dari pihak pemerintah bisa dipandang sebagai kesan atau pengakuan terhadap usaha-usaha keterlibatan Gereja di dalam kancah pembangunan bangsa, sambutan dari pihak penyelenggara bisa dinilai sebagai maksud dan tujuan dari kongres itu sendiri. Sebagai tujuan dari KUKSI II di Semarang, sambutan dari Mr. Tan Tjong Yan kiranya bisa sedikit memberi gambaran. Ia mengatakan: "Untuk sekian kalinya, Kongres ini memberi bukti kepada khalayak ramai bahwa kita, sesama manusia, tidak peduli bangsa dan warna, adalah semuanya anak-anak dari satu Bapa. Sebagai anak-anak dari satu Bapa, Yang tidak menghendaki perbedaan-perbedaan, kita insyaf atas kesatupaduan itu dan dengan dasar ini kita beramai-ramai berusaha untuk mencapai tujuan bersama bagi kepentingan Gereja, Nusa dan Bangsa."[5] Keprihatinan yang sempat ditangkap oleh penyelenggara tentang situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terungkap dalam bagian lain dari sambutannya yang berbunyi: "Pada dewasa ini, di mana di semua lapangan kesusilaan dan moral tertampak kemunduran, tetapi materialisme dipuja setinggi-tingginya, terlebih-lebih diperlukan pertemuan orang-orang Katolik dari seluruh Indonesia ini, agar kita semua diberi kesempatan untuk menjernihkan pikiran kita ke arah pengertian dan sikap bersama mengenai problem-problem yang kita hadapai sehari-hari."[6]

Situasi Gereja Katolik di Indonesia yang di satu pihak masih kecil dalam jumlah dan yang tengah mencoba membangun kesatuan intern sementara di lain pihak harus berpartisipasi dalam perjuangan negara, secara singkat tetapi tegas terumus dalam sambutan pembukaan Mgr. A. Soegijapranata, Vikaris Apostolik Semarang, sebagai berikut:

> "Persatuan jang erat; persatuan jang bulat dan pesat, itulah perkara yang perlu sekali untuk mendjamin hidup kita sehari-hari, sebagai orang perseorangan, sebagai isi rumah tangga, sebagai isi negeri dan

warga negara, pun pula sebagai anggota Geredja Katolik, dalam masa jang penuh pantjaroba seperti dewasa ini.
Bahkan kesatuan, jang mampat dan padat; kesatuan jang utuh dan teguh, itulah jang patut kita bentuk selekas mungkin, supaja kita merupakan suatu pasukan, yang djudjur dan teratur; satu pasukan yang serentak berdiri tegak, selalu siap sedia untuk menunaikan tugasnja dengan tekun dan tubi, demi kepentingan Gereja, Nusa dan Bangsa."[7]

Mgr. Soegijapranata yang juga berperan sebagai Penanggungjawab pelaksanaan KUKSI II ingin bahwa Gereja Katolik tidak menunda-nunda keterlibatannya dalam gerak pembangunan negara Indonesia yang masih muda. Beliau menekankan bahwa persatuan intern umat Katolik baru akan semakin jelas dan tegas apabila disumbangkan bagi kesejahteraan dan perkembangan negara Republik Indonesia. Beliau merumuskannya sebagai berikut:

"Akan tetapi, meskipun kita umat Katolik sebenarnja setjara beaneka warna telah mewudjudkan persatuan, akan tetapi sebagai umat Katolik Indonesia, perlulah menampakkan persatuan kita yang djelas dan tegas.
Sebab, hanja dengan bersatu padu dan bertekad bulat, kita akan mampu meluluskan tugas kita bersama ialah: (a) Menjelamatkan, memperkuat, dan memperkembangkan Geredja kita di tanah air kita dengan leluasa, berkat perhatian dan djaminan Pemerintah, jang berdasarkan Pantjasila seperti sekarang ini; (b) Mempersembahkan gaja dan daja, tenaga dan suara, untuk kesedjahteraan dan perkembangan Negara kita Republik Indonesia ke arah kesempurnaan."[8]

Di samping soal Pemilihan Umum, ada beberapa hal lain yang menjadi topik pembicaraan di dalam KUKSI II sebagai tanda keterlibatan dan kepedulian Gereja terhadap permasalahan negara. Sebagaimana telah dikatakan oleh Mgr. Soegijapranata bahwa kesatuan intern menjadi prasyarat bagi keterlibatan kemasyarakatan, maka keseimbangan gerak tercermin dalam makalah-makalah yang dipresentasikan, seperti Kerasulan, Aksi Katolik dan Pendidikan Kader, Pers Katolik, Ekonomi, Perguruan Tinggi Katolik, Ikatan Pelajar Sekolah Katolik , Ikatan Pekerja Pancasila. Dalam pembahasan Pendidikan Tinggi Katolik, sebagai salah satu contoh, keterlibatan Gereja untuk menyediakan tenaga yang terampil dan bermutu merupakan wujud dukungannya untuk pembangunan yang baik: "Mengingat pula masa pembangunan sekarang, dalam mana seperti diterangkan di atas bangsa Indonesia sedang mengisi kemerdekaan dan kedaulatan negara sesuai yang dicita-citakan bang-

sa Indonesia, kenyataan mana berarti bahwa golongan kita berhak dan wajib turut serta memberi isi di dalamnya dengan isi sesuai cita-cita kenegaraan menurut filsafat kenegaraan Katolik, setidak-tidaknya tiada bertentangan dari padanya, maka lebih menjadi urgent lagilah pembukaan perguruan tinggi Katolik kita".[9]

Pada kesempatan itu, Romo Driyarkara menyampaikan makalahnya yang berjudul "Aksi Katolik dan Pendidikan Kader". Yang dimaksud dengan Aski Katolik pada dasarnya tak lain dan tak bukan ialah PELAKSANAAN PERJUANGAN KATOLIK DI DUNIA INI.[10] Selanjutnya, bagaimana dan oleh siapa perjuangan Katolik itu dilaksanakan, Romo Driyarkara – sesuai dengan gambaran Gereja pada masa itu – mengatakan:

> "Geredja Kristus tersusun dari dua bagian ialah *hierarchia* dan *rakjat katholik*. Golongan ini disebut juga: para Awam (laici). Djanganlah dalam hal ini orang berpendapatan bahwa rakjat Kristen hanja harus bersifat pasif. Umat Katholik tidak boleh bersifat kambing-kambing dan domba-domba jang tidak memberi sumbangan kepada Geredja. Rakjat Katholik mempunyai wadjib juga atas penjutjian dunia, atas penjutjian seluruh bangsa manusia.
> Ingatlah bahwa perdjoangan Katholik tidak dapat dipisahkan dari Geredja Katholik. Maka, jang merupakan Geredja Katholik bukanlah hanja *hierarchia*, jang merupakan Geredja Katholik ialah keseluruhan *Hierarchia* dan Umat Katholik."[11]

Secara ringkas dan/atau dengan bahasa Konsili Vatikan II, bisa dikatakan bahwa kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus, menunaikan bagian mereka dalam perutusan segenap umat Allah dalam Gereja dan di dunia (*bdk.* AA 2, LG 31).

Mengenai Pendidikan Kader, Romo Driyarkara menyebut bahwa tiap-tiap gerakan untuk beraksi memerlukan kader. Untuk kader-kader Aksi Katolik, menurut Romo Driyarkara, harus memiliki pandangan yang lebih luas, yang menjangkau lingkungan non-Katolik: "Mendidik kader Katolik berarti juga mendidik kader untuk keperluan masyarakat Indonesia pada umumnya." Selanjutnya, dikatakan bahwa tidak ada bidang kehidupan yang tidak bisa dijadikan medan kerasulan. Paling tidak, seorang kader haruslah kompeten dalam bidang spesialisasinya tanpa boleh melalaikan pengetahuan umum.

Pada akhir makalahnya, Romo Driyarkara menunjuk bidang-bidang yang bisa menjadi tempat pendidikan kader, seperti sekolah dan organisasi. Namun, segala macam pendidikan kader, menurut Romo Driyarkara, hanya akan sia-sia kalau tidak ada dukungan dari pihak keluarga:

"Sia-sialah kita akan mencoba mendidik kader, jika kita tidak menerima calon dari keluarga. Sebab itu, pendidikan kader yang pertama-tama ialah di rumah tangga."

Sebagai catatan historis, dapatlah ditambahkan bahwa pada Pemilihan Umum tahun 1955 Partai Katolik mendapat 6 kursi dari 260 kursi DPR (atau 2,3%) dan 10 kursi dari 520 kursi Konstituante (atau 1,9%). Sebuah hasil yang sungguh-sungguh di luar perkiraan.

Musyawarah Umat Katolik Seluruh Indonesia (MUKSI) 1972

Dalam periode 1960 – 1970, terjadi perubahan besar bagi umat Katolik di Indonesia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakannya sebagai suatu revolusi. Yang pertama, Konsili Vatikan II merupakan "Revolusi" dalam Gereja Katolik yang gema dan konsekwensinya tidak hanya dirasa oleh umat Katolik, termasuk umat Katolik di Indonesia. Yang kedua, peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 telah mengubah peta politik negara Indonesia. Bukan hanya para pimpinan pemerintahan yang berubah tetapi juga *policy* pemerintahan. Pemerintahan yang baru menamai dirinya sebagai Orde Baru untuk membedakan diri dari pemerintahan lama yang kemudian disebut Orde Lama. Di tengah-tengah perubahan drastis inilah umat Katolik di Indonesia merasa perlu adanya pegangan dari pimpinan Gereja.

Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), dalam rangka mempersiapkan Sidang Tahunannya untuk tahun 1970, memiliki gagasan untuk membicarakan persoalan-persoalan aktual yang sedang hidup di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, dan umat Katolik pada khususnya, sebagai salah satu agenda persidangan. Dalam rapat persiapan itu pula, Dewan Harian MAWI telah memiliki gambaran tentang hal-hal yang diperlukan. Dari rapat-rapat persiapan dan dari Sidang MAWI 1970 itulah akhirnya muncul naskah definitif *Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia*.[12]

Sementara itu, Musyawarah Umat Katolik Seluruh Indonesia diadakan di Klender, Jakarta, dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 1972 dengan tema pokok: *Partisipasi Umat Katolik Di Dalam Pembangunan*. Tujuan MUKSI adalah menggarap pemikiran-pemikiran yang ada, baik dari kalangan Katolik maupun non-Katolik, yang dapat disumbangkan bagi pembangunan Indonesia, sambil berpegang pada Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia yang dihasilkan oleh Sidang MAWI 1970. Dari empat bidang kemasyarakatan umum yang ada dalam Pedoman Kerja, MUKSI mengolah tiga bidang sentral, yakni sosio-edukatif, sosio-

politik, dan sosio-ekonomi. Musyawarah yang bersifat rapat kerja itu diprakarsai oleh sejumlah tokoh Katolik dari pelbagai unsur umat, seperti Dr. S.W.J. Suradi, Drs. A.R. Abdisa, R.G. Duriat, Dr. J. Riberu, Justinus Kardinal Darmojuwono, dan Mgr. Leo Sukoto.[13]

Dari kesimpulan-kesimpulan MUKSI I yang menyangkut bidang-bidang sosio-edukatif, sosio-politik, dan sosio-ekonomi, tampak bahwa musyawarah yang bersifat rapat kerja itu menghasilkan pedoman sangat umum dan yang masih harus dikonkretkan sesuai dengan tuntutan situasi. Sewaktu hasil-hasil MUKSI I dibawa kepada Kepala Negara, beberapa hal mendapatkan tanggapan. *Pertama*, pemikiran-pemikiran yang sejajar dengan pemikiran pemerintah dipandang sebagai bentuk peneguhan pada *policy* pemerintah. Di lain pihak, pemikiran-pemikiran yang berbeda akan merupakan batu ujian dan bahan-bahan untuk mengadakan koreksi. *Kedua*, pelaksanaan MUKSI itu sendiri secara umum dipandang oleh Kepala Negara sebagai bukti bahwa umat Katolik tidak mau tinggal diam tetapi terus berusaha untuk berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab di dalam pembangunan. *Ketiga*, Kepala Negara secara khusus memberi tanggapan terhadap kesimpulan-kesimpulan sekitar soal pembangunan pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya serta pembinaan kesadaran berpolitik.[14]

MUKSI I diselenggarakan pada awal September 1972. Pada bulan Maret 1973, berlangsung Sidang Umum MPR hasil Pemilihan Umum tahun 1971. Dalam Pemilihan Umum tahun 1971 itu, terdapat sepuluh OPP (Organisasi Peserta Pemilu) yang terdiri dari sembilan partai dan Golongan Karya. Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk membuat undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan, dan kekaryaan menuju penyederhanaan. Lewat berbagai negosiasi, akhirnya disepakati bahwa sembilan partai politik dilebur menjadi dua buah partai, sedangkan Golongan Karya dijadikan partai politik yang berdiri sendiri. Maka, sejak tanggal 10 Januari 1973 sampai dengan jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, secara resmi hanya ada tiga partai politik di Indonesia: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak hari itu pula, berakhirlah sejarah Partai Katolik karena telah diintegrasikan ke dalam PDI bersama-sama dengan PNI, Parkindo, IPKI, dan Murba.

Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia (PNUKI) 1984

Berbeda dengan kesempatan-kesempatan pertemuan nasional yang mendahului, PNUKI ini bisa disiapkan secara lebih terprogram dan

melibatkan seluruh umat Katolik. PNUKI sendiri dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 12 Juli 1984 dan memang hanya dihadiri oleh para wakil dari keuskupan-keuskupan, namun proses sampai pelaksanaannya telah melibatkan pihak keuskupan, paroki, dan bahkan lingkungan-lingkungan terkecil. PNUKI diselenggarakan dalam rangka perayaan 450 tahun kehadiran Gereja Katolik di bumi Nusantara. Dengan kata lain, nuansa syukur lebih dominan tanpa melupakan kesatuan iman yang begitu kental terasa di tengah-tengah perbedaan asal, suku, profesi, dan jalur perjuangan.[15]

Tujuan PNUKI sendiri kiranya sudah tersirat dalam tema yang dipilih: "*Peningkatan Partisipasi Umat Katolik Indonesia dalam Membangun Masyarakat Pancasila*". Bapa Suci Yoannes Paulus II menggarisbawahi partisipasi umat ini dengan secara eksplisit menyebut soal kesaksian: "... para awam pria maupun wanita berperan serta dalam karya sosial dan pembangunan nasional di sekolah dan Perguruan Tinggi, di rumah sakit-rumah sakit ... tidak hanya di kota-kota besar melainkan juga di seluruh Nusantara. Betapa berharga kesaksian hidup kristen mereka dalam upaya memperkaya kehidupan bangsanya demi kebaikan semua warganya".[16] Kalau Bapa Suci memperlihatkan apa yang sudah dibuat oleh umat Katolik, Menteri Agama Indonesia melihat tema PNUKI sebagai suatu janji, suatu tekad untuk berperan serta secara aktif: "Tema itu memberikan arti bahwa umat Katolik Indonesia bertekad akan lebih memahami, lebih menghayati dan meningkatkan pengamalan serta melestarikan Pancasila. Tema itu juga mengandung arti bahwa umat Katolik Indonesia akan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan bangsa dan negara ini sebagai pengamalan Pancasila, menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur, utuh dan seimbang antara kesejahteraan lahir dan keselamatan batin, kebahagiaan di dunia fana ini dan di akherat nanti. Saya berharap hendaknya tema itu nanti benar-benar terpantul dalam pandangan dan sikap umat Katolik Indonesia."[17]

Pada akhir pelaksanaan PNUKI, para peserta menyetujui Kesepakatan Bersama yang terdiri atas delapan butir: soal keluarga, kaum muda, pendidikan, kesehatan, kehidupan menjemaat, dan kehidupan bernegara. Butir-butir tersebut sekaligus mau memperlihatkan bahwa termasuk panggilan umat Katoliklah untuk berpartisipasi di dalam gerak pembangunan yang sedang digumuli oleh bangsa Indonesia.[18] Meski bentuk dukungan Gereja terhadap pemerintah amat dominan, tidak dapat disangkal adanya keprihatinan terhadap merebaknya praktek-praktek penyelewengan. Ungkapan keprihatinan ini paling jelas dan

tegas terumus dalam imbauan para uskup bagi umat yang berkecimpung dalam hidup kemasyarakatan dan politik:

> "Kami tidak dapat mewajibkan semua saudara seiman supaya menjadi pahlawan. Namun, kami berharap dan berdoa supaya tetap terdapat di kalangan umat kita, banyak orang yang tegas-tegas menolak ikut dalam permainan kotor mana pun. Agar sedapatnya bertahan terhadap godaan yang tidak sedikit dan mencari teman yang sependirian. Sebab, dengan bersama-sama kita akan lebih kuat bertahan dan melawan. Kami meminta dengan sangat supaya orang Katolik memberi teladan sebersih mungkin di mana saja mereka berkarya dan berusaha. Orang Katolik hendaknya menjaga diri terhadap praktek-praktek yang tidak terpuji itu, seperti sogokan, penggelapan, koneksian, manipulasi, intrik, dan sebagainya."[19]

Sidang Agung KWI-Umat (1995), Surat Gembala Prapaska (1997), Pembentukan FMKI (1998)

PNUKI 1984 diselenggarakan untuk menandai 450 tahun kehadiran Gereja Katolik di Indonesia. Pada tahun 1995, negara Indonesia memperingati 50 tahun kemerdekaan. Untuk menandai pesta emas kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, KWI mengadakan Sidang Agung KWI-Umat: Menempatkan masalah-masalah gerejawi dalam konteks pengutusan Gereja sebagai saksi Kristus di dunia. Oleh karena itu, Sidang KWI dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pertemuan antara para wakil umat dengan para uskup (28 Oktober – 2 November). Yang kedua, Sidang Tahunan KWI (3 – 10 November). Keterlibatan Gereja dalam hidup bernegara menjadi tema sentral di dalam Sidang Agung-Umat ini, mulai dari persoalan keluarga, kaum muda, kehidupan menjemaat sampai dengan keterlibatan sosial-politik. Yang jelas, Sidang Agung-Umat sendiri merupakan puncak dari bentuk-bentuk persiapan yang sudah dimulai di masing-masing keuskupan sesuai dengan kadar keprihatinan setempat.[20]

Tahun 1996 ditandai dengan pelbagai macam pergolakan sosial-politik-keagamaan. "Peristiwa 27 Juli" memuncaki kemelut politik yang melanda PDI. Sentimen sosial-keagamaan tampak dalam kerusuhan, perusakan, dan pembakaran rumah-rumah ibadat dan penjarahan terhadap kelompok etnis tertentu. Surat Gembala Prapaska 1997 merupakan rangkuman yang tegas dan ringkas dari sikap Gereja Katolik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1996, terhadap situasi kemasyarakatan dan kemerosotan moral pada umumnya, serta terhadap Pemilihan Umum 1997. Praktek-praktek penyelewengan yang

tidak lagi mengenal rasa malu, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme disorot dengan amat tajam oleh Surat Gembala Prapaska. Khususnya pandangan Surat Gembala terhadap Pemilihan Umumlah yang menimbulkan tanggapan luas.[21] Tidak boleh dilupakan, Surat Gembala Prapaska ditulis pada tahun 1997, yakni ketika kekuatan dan kekuasaan Orde Baru berada dalam puncaknya. Oleh karena itu, juga bisa dipahami kalau Surat Gembala juga menimbulkan pro-kontra di dalam lingkungan Gereja Katolik sendiri. Di satu pihak, ada suasana ketakutan bahwa Gereja akan semakin dipojokkan dan dianiaya. Di lain pihak, tidak sedikit yang menilai isi Surat Gembala sebagai suara kenabian. Bagaimanapun juga, Gereja memang harus mengambil sikap dan telah melakukannya.

Krisis ekonomi yang melanda Asia akhirnya juga meruntuhkan satu-satunya kebanggaan pemerintahan Orde Baru, yakni pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi segera disusul krisis politik. Pemerintahan baru sebagai hasil Pemilihan Umum 1997 hanya berumur dua bulan. Lahir era baru yang dikenal sebagai Era Reformasi. Tuntutan akan reformasi total tidak bisa dibendung lagi, termasuk di dalamnya kehidupan berpolitik. Umat Katolik juga mencari pegangan untuk bertindak: kepada siapa atau lembaga manakah mereka harus berpaling. Antara lain dalam suasana seperti inilah usaha pembentukan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) harus diletakkan.

Penutup

Partisipasi dan keterlibatan adalah kata kunci yang muncul dalam setiap pertemuan gerejawi berkaitan dengan negara. Dalam KUKSI I, nuansa keterlibatan Gereja belum begitu kentara, karena itulah untuk kali pertama umat Katolik bertemu tidak hanya sebagai saudara-saudara seiman tetap juga sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Meskipun demikian, keputusan untuk menyatukan organisasi-organisasi Katolik yang ada di bawah satu bendera "nasional", satu bendera "Indonesia", sudah merupakan dukungan yang penuh dengan simbol dan makna. Sebab, sementara Indonesia sebagai kesatuan politis masih terus dinegosiasikan, Gereja Katolik telah mengambil langkah untuk melepas warna dan atribut-atribut kedaerahan serta kesukuan untuk memulai kehidupan organisatoris sebagai satu bangsa.

Sejak KUKSI II di Semarang, para pimpinan Gereja telah mendorong warganya secara tegas dan eksplisit untuk terlibat secara aktif mengisi kemerdekaan negara Indonesia, entah lewat bidang pendidikan,

kesehatan, sosial maupun lewat kehidupan politik. Romo N. Driyarkara secara konkret menunjukkan bahwa tidak ada satu bidang kehidupan pun yang tidak bisa dimasuki oleh awam sebagai medan kerasulan. Penyucian dunia adalah tugas perutusan kaum awam. Partai Katolik dengan tokohnya Bapak I.J. Kasimo adalah wujud keterlibatan dan bentuk dukungan nyata dari Gereja Katolik pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Peran Mgr. A. Soegijapranata didalam mendampingi dan memimpin umat Katolik di masa-masa pancaroba politik menjadi semacam peneguh dan penjamin komitmen keterlibatan Gereja dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Benar, tidak ada jadwal yang teratur bagi masyarakat Katolik untuk mengadakan kongres, musyawarah, atau pertemuan yang berskala nasional. Namun, di setiap kesempatan pertemuan, Gereja Katolik memperlihatkan sikapnya yang jelas: melibatkan diri secara aktif di dalam kesejahteraan rakyat karena partisipasi dan solider dalam keprihatinan bangsa merupakan tugas perutusannya. Turut serta dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak berarti bahwa Gereja tidak boleh memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda dengan pemerintah.

Kesimpulan-kesimpulan MUKSI 1972, khususnya dalam bidang sosio-ekonomi, cukup memperlihatkan adanya perbedaan pemikiran tersebut. Gereja menekankan penataan mentalitas manusia dan pemberdayaannya sebagai fundamen kesejahteraan rakyat. Gereja mendorong pembangunan masyarakat desa agar dengan demikian bahan-bahan baku di desa dimanfaatkan dan dengan begitu masyarakat desa didorong untuk tetap tinggal di desa. Gereja mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan itu merata sehingga kesejahteraan dan kemajuan dapat dinikmati bersama-sama sehingga tidak akan terjadi gejolak-gejolak sosial.

Sejak PNUKI 1984, Gereja mulai dengan lebih lantang menyebut penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam pelaksanaan pembangunan. Surat Gembala Prapaska 1997 merupakan salah satu manifestasi paling jelas dan lugas dari posisi Gereja. Yang menjadi tujuan keterlibatan Gereja adalah kesejahteraan rakyat, pembebasan manusia dari segala penindasan dan ketidakadilan. Kalau Gereja menyuarakan adanya kemerosotan moral dan menunjukkan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, itu tidaklah berarti bahwa Gereja telah menarik komitmen keterlibatannya. Gereja tetap konsisten, yakni harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Kalau pemerintah tidak lagi mengabdi kepada kepentingan rakyat, ia juga telah kehilangan legitimitas moral. Oleh karena itu, Gereja dari semula selalu mendukung dan melibatkan

diri pada pembangunan, dan Gereja selalu konsisten pada komitmen dan tujuan keterlibatannya: kesejahteraan rakyat, menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera.

CATATAN

1 Kami sudah mencoba menguraikan tema ini dalam *Orientasi Baru* 1998, no.11:41–48.

2 Adisubrata, Y. (ed.), *I.J. Kasimo. Hidup dan Perjuangannya* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 69.

3 Sambutan Bapak Hadisoebeno Sosrowerdojo, Walikota Semarang, pada tanggal 1 Desember 1954, dlm: *KUKSI 27–29 Desember 1954*, hlm. 9.

4 Sambutan Bapak Moch. Bachroen, Panglima Divisi Diponegoro, *ibid.*, hlm. 8.

5 Sambutan Mr. Tan Tjong Yan, Wakil Ketua Panitia Pusat KUKSI, *ibid.*, hlm. 7.

6 *Ibid.*

7 Sambutan Mgr. Albertus Soegijapranata, Vikaris Apostolik Semarang, *ibid.*, hlm. 5.

8 *Ibid.*

9 Mr. A. Soehardi, *Perguruan Tinggi Katolik*, Makalah yang disampaikan dalam Sidang Pleno KUKSI II pada tanggal 28 Desember 1954.

10 N. Driyarkara, *Aksi Katolik dan Pendidikan Kader*, Makalah yang disampaikan dalam Sidang Pleno KUKSI II pada tanggal 28 Desember 1954.

11 *Ibid.*, butir 12.

12 Teks lengkap, sejarah peredaksiannya bisa diperdalam dalam *Spektrum* 1971.

13 Secara ringkas, peristiwa ini dilaporkan oleh *HIDUP*, 17 September 1972.

14 *Kompas*, 18 September 1972.

15 Peristiwa ini dilaporkan dalam *HIDUP*, 29 Juli 1984 dan 12 Agustus 1984.

16 Sambutan tertulis Bapa Suci untuk memperingati perayaan 450 tahun kehadiran Gereja Katolik di Indonesia yang dikirim pada tanggal 29 April 1984.

17 Sambutan Bapak H. Munawir Sjadzali, Menteri Agama RI, di dalam acara Pembukaan PNUKI pada tanggal 8 Juli 1984.

18 Kesepakatan Bersama, butir 44, *Spektrum* 12 (1984), no. 2 & 3.

19 Dikutip dari ceramah Mgr. Dr. A.B. Sinaga yang bertajuk "Kesatuan Iman dan Kepelbagaian Pengamalannya", disampaikan dalam PNUKI pada tanggal 10 Juli 1984.

20 Peristiwa ini dilaporkan secara agak lebih lengkap oleh *HIDUP*, 12 November 1995 dan 19 November 1995.

21 Tanggapan, reaksi, dan diskusi-diskusi yang dilaksanakan dalam rangka menanggapi Surat Gembala Prapaska ini dilaporkan dalam *HIDUP*, 15 Juni 1997.

DAFTAR PUSTAKA

Adisubrata, Y. (ed.),
1980 *I.J. Kasimo. Hidup dan perjuangannya.* Jakarta: Gramedia.

Bank, Jan,
1999 *Katolik. Di masa Revolusi Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

———,
1997 Keprihatinan dan Harapan (Surat Gembala Prapaska), *Spektrum* 25, no. 4, 79–93.

———,
1972 *Kesimpulan-kesimpulan MUKSI I. Musyawarah Umat Katolik Seluruh Indonesia, 2 s/d 8 September 1972 di Klender, Jakarta.*

———,
1954 *Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia, tanggal 27–29 Desember 1954.*

Mangunwijaya, Y.B.,
1999 *Gereja Diaspora.* Yogyakarta: Kanisius.
1999 *Memuliakan Allah, Mengangkat Manusia.* Yogyakarta: Kanisius.
1971 Pedoman kerdja umat Katolik Indonesia, *Spektrum* 1, no.1, 5–47.

Sularto, St. (ed.),
1998 *Visi Sosial Politik. Tantangan & Kemungkinan.* Yogyakarta: Kanisius.

Tonny D. Widiastono dkk. (ed.),
1995 *Gereja Katolik Indonesia Mengarungi Zaman. Refleksi Keuskupan Agung Jakarta.* Jakarta: Gramedia.

Widyahadi Seputra, A. dkk. (ed.),
1998 *Roh Kudus. Membangun Persaudaraan Sejati,* Jakarta.
1999 *Allah Bapa. Menyayangi Semua Orang,* Jakarta.
1999 *Hidup dalam Persaudaraan Sejati. Sudut Pandang Para Uskup,* Jakarta.
1999 *Menggalang Persatuan Indonesia Baru. Sudut Pandang Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, dan Kepercayaan,* Jakarta.